

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 pada hari Rabu, 31 Mei 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyerahan dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Bpk Dr. Harry Azhar Azis, MA, Gubernur Nusa Tenggara Barat. LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat TA 2016 memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Setelah penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 pada sepuluh pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima, dan Kota Mataram. Sepuluh entitas ini seluruhnya memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penyerahan diselenggarakan di Ruang Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTB tanggal 31 Mei 2017. LHP diserahkan oleh **Kepala Perwakilan BPK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wahyu Priyono**, kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah terkait dengan disaksikan oleh Anggota VI BPK RI dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Harry Azhar Azis menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Anggota VI BPK RI mengapresiasi kami atas upaya pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan menyelenggarakan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan LHP yang diserahkan BPK RI terdiri dari tiga bagian yang tidak terpisahkan, meliputi :

- LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memuat opini;
- LHP atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Melalui kegiatan ini, BPK RI berharap mutu hubungan kelembagaan BPK RI dengan pemangku kepentingan dan pemahaman serta dukungan masyarakat terhadap BPK RI dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara/Daerah yang akuntabel dan transparan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.